

**MENGEJAR KETERTINGGALAN: MENGGALI POTENSI
SEKTOR AGRIBISNIS KABUPATEN FAKFAK, PROVINSI PAPUA BARAT**

Pandhu Yuanjaya

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
pandhu@uny.ac.id

Abstract

This study aims to discuss policies in the agribusiness sector that was carried out by the Fakfak Regency government. This becomes important considering various policies in improving people's welfare was unsuccessful. Special autonomy which is expected to accelerate the pace of development has made the dependence on central government funding was increasing. This study used a qualitative approach.. The results of the study showed that the Fakfak Regency has large natural resource potential in the business sector. Policies that have been implemented the Agropolitan, Agro-tourism and Forest Management program. That policies trigger significant progress in productivity. The policies faced some challenges that is the availability of labor, the mindset of the community, customary land rights, investment, banking, cooperatives and the lack of performance of institutional networks (public, private and civil society partnerships).

Keywords: *Regional Potential, Agribusiness Sector, and Fakfak Regency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan di sektor agribisnis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak. Hal ini menjadi penting mengingat berbagai kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami kegagalan. Otonomi khusus yang selama ini diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan justru membuat ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumberdaya alam yang besar disektor agribisnis. Kebijakan yang telah dilaksanakan yaitu perogram Agropolitan, Agrowisata dan Pengelolaan Hutan. Ketiga kebijakan tersebut menunjukkan kemajuan produktifitas yang cukup berarti. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya, ketersediaan tenaga kerja, pola pikir masyarakat, tanah hak ulayat, investasi, perbankan, koperasi dan masih kurangnya kinerja jaringan kelembagaan (*public, privat and civil society partnership*).

Kata kunci: Potensi Daerah, Sektor Agribisnis, dan Kabupaten Fakfak

PENDAHULUAN

Berharap pada sektor agribisnis di tanah Papua bukanlah sebuah keniscayaan. Papua memiliki potensi sebagai wilayah terkaya di Indonesia dengan wilayah yang luas dan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki (Wambrau, 2013). Potensi besar sumberdaya alam di Papua tidak hanya tentang industri ekstraktif, sektor yang selama ini dianggap sensitif dan kontroversial. Potensi sebenarnya terletak pada sektor agribisnis yang memang menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat, dibanding dengan industri pertambangan yang hanya melibatkan sebagian kecil penduduk Papua. Pemerintah telah mengeluarkan banyak program untuk mengembangkan agribisnis, namun banyak diantara program tersebut gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bakti, 2008; Imbiri, 2010; Mampio, D. A, 2008).

Program utama yang telah dilaksanakan di tanah Papua yaitu otonomi khusus. Otonomi khusus tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar sebagai manusia sekaligus mengurangi kesenjangan yang terjadi pada hampir semua sektor, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik

dibandingkan daerah lain (King, 2004). Pemerintah pusat yakin dengan otonomi khusus, tidak lebih dari 25 tahun, kemiskinan akan berkurang, pertumbuhan ekonomi akan pesat, dan kapasitas manusia akan meningkat. Hal ini beralasan karena Wilayah dengan otonomi khusus memiliki anggaran yang melimpah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sesuai tujuan daerah tersebut.

Provinsi Papua Barat telah menerima dana mencapai Rp. 11,070 triliun selama tahun 2009 hingga tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, Ditjen Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat). Dana tersebut seharusnya menjadi kesempatan emas bagi masyarakat Papua Barat mengatur diri sendiri untuk mengembangkan daerahnya jauh lebih cepat (Joku, 2007). Hal ini karena masyarakat lokal bisa menentukan tujuan bersama dengan proses *bottom up* dan juga bagi pemerintah di Papua Barat dapat memanfaatkan sebagai *entry point* yang strategis dalam menguatkan pemerintahan daerah, serta diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di Provinsi Papua terutama masalah kesejahteraan masyarakat.

Dalam kenyataannya, setelah sembilan tahun berjalan belum banyak kemajuan berarti yang dirasakan masyarakat Papua Barat (Fanggidae, Fajri, dan Yuanjaya, 2016). Dengan kata lain, otonomi khusus yang selama ini diimplementasikan justru menghasilkan dampak yang asimetris bila dibandingkan dengan pelaksanaan otonomi daerah di propinsi-propinsi lain. Masyarakat Papua Barat tetap hidup di tengah konflik politik dan keterpurukan ekonomi sosial. Secara garis besar, Papua Barat sampai saat ini seperti sangat sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan jerat korupsi. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut dalam implementasinya justru semakin meningkatkan ketergantungan daerah dan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Pusat, pada akhirnya banyak terjadi masyarakat yang tetap miskin, pembangunan dianggap gagal, birokrasi dianggap tidak mampu menciptakan pelayanan hak-hak dasar dan kinerja yang baik bagi publik (Indonesia Governance Index (IGI), 2014). Padahal, pemerintah hanya tinggal memperhatikan potensi dan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku pembangunan.

Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang menjadi lokasi penelitian ini juga mengalami masalah seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya. Otonomi khusus yang telah dilaksanakan tidak membawa perubahan besar dalam pembangunan daerah. Hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan berskala besar dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat, salah satunya dengan pengembangan sektor agribisnis. Alasannya jelas, sebagian besar masyarakat masih hidup atau memiliki kegiatan ekonomi pada sektor *agriculture*. Dana otonomi khusus juga sebagian besar digunakan dalam program agribisnis secara masif.

Bila melihat potensi agribisnis, sektor pertanian merupakan sektor yang mendominasi pembentukan PDRB Kabupaten Fakfak tahun 2010 sebesar 25,89% (BPS Kab. Fakfak, 2011). Perkebunan di Kabupaten Fakfak yang menjadi komoditi unggulan adalah tanaman Pala, dengan jumlah luas lahan kebun meningkat setiap tahunnya. Luas total areal perkebunan tahun 2010 sekitar 12.103,83 Ha yang di perkirakan terus meningkat dengan pembukaan lahan baru. Sektor kehutanan memiliki potensi yang sangat dominan karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Fakfak masih di dominasi oleh hutan sekitar 81,5 % dari seluruh luas wilayah Fakfak. Dari data yang ada sektor kehutanan baru memberikan kontribusi sebesar 7% dari

PDRB Kabupaten Fakfak pada tahun 2010 (BPS, 2010). Selain itu potensi yang dapat dikembangkan lainnya adalah peternakan yang meliputi sapi, babi, kambing dan sebagainya.

Harus diakui bahwa dengan potensi agribisnis yang sangat besar di Kabupaten Fakfak, masih belum dapat dioptimalkan. Masyarakat, dengan pengetahuan, keahlian, tenaga dan permodalan yang terbatas, tentu tidak dapat berjalan sendiri dalam mengelola potensi tersebut. Keberhasilan program agribisnis juga tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan agribisnis sebagai investasi dan penggerak pasar, dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Selain dari ketiga komponen tersebut, di lapangan ditemukan kendala yang dihadapi oleh masyarakat berupa adanya mafia pemasaran produk agribisnis atau yang biasa di sebut *tengkulak*. *Tengkulak* mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga di tingkat petani dengan berbagai cara. Tentu hal ini sangat membahayakan masyarakat Kabupaten Fakfak yang saat ini hingga saat ini selalu menjual hasil pertaniannya kepada *tengkulak*.

Uraian sebelumnya menggambarkan bahwa sektor agribisnis

di Kabupaten Fakfak menjadi harapan dalam upaya pemanfaatan dan pengurangan ketergantungan terhadap dana otonomi khusus. Agribisnis menjadi program yang penting dan signifikan untuk mengurangi kemiskinan (AIP, 2013). Dalam pengembangan Kawasan Agribisnis di Kabupaten Fakfak maka terdapat 4 hal penting yang menjadi syarat agar konsep pengembangan Kawasan Agribisnis dapat diwujudkan (Djakapermana, 2007):

- a. Investasi dalam Bidang Agro Industri
 - b. Promosi Produk Unggulan
 - c. Pengelolaan Agrikultura dan Industri yang Berkesinambungan
 - d. Penyusunan *Master Plan* Pengembangan Kawasan Agribisnis
- Sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Melalui pendekatan sistem Kawasan Agribisnis, produk pertanian akan diolah terlebih dahulu di pusat kawasan sebelum dijual ke pasar (ekspor), sehingga nilai tambah tetap berada di kawasan agribisnis (Daidullah, 2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan tentang pengembangan ekonomi rakyat yang ada di Kabupaten Fakfak. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Analisis data sekunder akan digunakan untuk mengetahui capaian pembangunan daerah ditingkat kabupaten dan untuk mengidentifikasi potensi lokal yang ada di Kabupaten Fakfak. Untuk menguji keabsahan data tersebut dilakukan langkah triangulasi data dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber data baik data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dilakukan pencocokan antar data tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut Marshall dan Rossman dalam Kabalmay (2002):

1. Mengorganisasikan data
2. Pengelompokan data
3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data
4. Mencari alternatif penjelasan bagi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kabupaten Fakfak

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang ada di Propinsi Papua Barat dan termasuk

daerah tertua yang ada di wilayah Papua. Secara administratif, Kabupaten Fakfak merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Fakfak (induk) menjadi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Pemekaran wilayah tersebut terjadi pada tahun 2002 yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002. Dari hasil pemekaran tersebut, Kabupaten Fakfak saat ini memiliki luas wilayah 14.320 km² dengan jumlah penduduk 70.902 jiwa (kepadatan 4,95 per Km²). Kabupaten Fakfak terbagi kedalam sembilan distrik dan 123 kampung/kelurahan.

Potensi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Fakfak Berbasis Agribisnis

Merujuk pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Fakfak (RPJMD 2011-2015), pengembangan telah direncanakan di berbagai sektor berbasis kondisi keunggulan di masing-masing wilayah. Untuk meningkatkan keunggulan wilayah/daerah masing-masing di Kabupaten Fakfak, Pemerintah merencanakan Pembangunan Daerah yang dilakukan dengan cara meningkatkan fungsi masing-masing wilayah distrik sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya dengan pengembangan kawasan strategis daerah.

Tabel 1. Skema Strategi Pengembangan Potensi Daerah Kabupaten Fakfak

Sektor	Strategi	Kelompok Sasaran	Program
• Pertanian dan Peternakan	Pemberdayaan masyarakat, pengembangan UKM, perbaikan infrastruktur	Individu, kelompok masyarakat dan pemilik UKM	Program Agropolitan dan Program Agrowisata
• Kehutanan dan Perkebunan	Industri pengelolaan kayu melalui investasi perusahaan swasta (HPH)	Individu, Kelompok masyarakat	Pengelolaan Hutan

Dalam Tabel 1 terlihat bahwa ada empat sektor yang menjadi fokus pengembangan potensi daerah. Skema strategi tersebut sebelumnya menggambarkan Pemerintah Kabupaten Fakfak menitikberatkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan dan perbaikan infrastruktur.

1. Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian dan peternakan, sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Fakfak periode 2011-2015, merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Sektor ini berupaya mewujudkan swasembada pangan daerah dan masyarakat petani yang sejahtera, maju, dan mandiri. Upaya ini diwujudkan melalui pengembangan kawasan agribisnis terpadu dan pangan organik di Distrik Bomberay. Pilihan kepada Distrik Bomberay sebagai wilayah pengembangan program agribisnis berdasarkan kenyataan bahwa distrik ini

merupakan wilayah padang rumput yang sangat luas, sehingga memiliki potensi pengembangan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan hutan tanaman industri yang sangat besar.

Program Agribisnis di Distrik Bomberay

Sebagai program unggulan Pemerintah Kabupaten Fakfak, program agribisnis yang dikembangkan di Distrik Bomberay telah memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat petani yang tinggal di distrik tersebut. Salah satu kontribusi riil realisasi program tersebut adalah pembangunan fasilitas transportasi untuk mendukung peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian. Perbaikan kondisi transportasi dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam memasarkan produk pertanian dari Distrik Bomberay ke Kota baik dari segi waktu maupun biaya. Kontribusi yang lain adalah program pengembangan kawasan agribisnis di Distrik Bomberay telah mampu meningkatkan populasi ternak sapi secara signifikan di Distrik

Bomberay. Adanya bantuan sapi dapat meningkatkan kepemilikan ternak di setiap rumah tangga sebanyak 10-15 ekor sapi. Populasi sapi di Distrik Bomberay pada 2011 mencapai 2.109 ekor (Kab. Fakfak dalam Angka, 2012). Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 berjumlah 806 ekor. Ini menunjukkan bahwa dalam tenggang waktu dua tahun Pemerintah Kabupaten Fakfak telah mampu meningkatkan jumlah populasi sapi di kawasan agribisnis sebesar 261 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat. Peningkatan ini membuat jumlah populasi di Distrik Bomberay melampaui distrik lain. Di tahun 2011, rata-rata populasi sapi di delapan distrik yang lain sebesar 34 ekor, sedangkan jumlah populasi sapi di Distrik Bomberay, seperti dinyatakan sebelumnya, berjumlah 2.109 ekor. Ini menunjukkan bahwa populasi sapi di Distrik Bomberay dibandingkan dengan distrik yang lain rata-rata adalah 62 kali lipat lebih tinggi (Kab. Fakfak dalam Angka, 2012).

Di samping peningkatan sarana transportasi, berupa pembukaan jalan dari Distrik Fakfak menuju Distrik Bomberay sebagai kawasan transmigrasi, daerah ini juga dikembangkan sebagai sentra tanaman padi. Banyaknya transmigran dari Jawa yang banyak menguasai bidang

pertanian, khususnya tanaman padi, dan jenis tanah yang berupa padang rumput, maka di kawasan ini layak untuk dikembangkan sebagai sentra pertanian padi sawah. Pengembangan pertanian padi sawah juga dilakukan masyarakat lokal yang mengikuti transmigrasi di Distrik Bomberay. Peningkatan produktivitas pertanian yang menghasilkan komoditas makanan pokok yang meliputi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari tahun 2007-2011 produksi keempat komoditas tersebut belum mengalami perbaikan, bahkan secara umum mengalami penurunan. Dari keempat komoditas tersebut hanya produksi jagung yang cenderung mengalami peningkatan, sedangkan produksi padi, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan (Kab. Fakfak dalam Angka, 2012). Produksi jagung tahun 2007 adalah 15,36 ton, mengalami peningkatan tahun 2008 dan 2009 menjadi 16,85 dan 16,9 ton. Produksi ini menurun sedikit menjadi 16,72 ton tahun 2010 dan meningkat tahun 2011 menjadi 31,11 ton. Sementara itu, untuk produktivitas pertanian padi dan ubi jalar terlihat memiliki kecenderungan yang sama,

yaitu dari tahun 2007 ke tahun 2010 mengalami penurunan secara gradual dan memasuki tahun 2011 mengalami penurunan secara tajam. Sementara itu, untuk produksi padi dari tahun 2007 ke tahun 2011 mengalami fluktuasi secara gradual, tetapi secara umum menunjukkan penurunan.

Program Agrowisata Hortikultura di Distrik Kramongmongga

Agrowisata Kramongmongga dibangun sebagai sentra buah-buahan dan pembibitan tanaman hortikultura, seperti durian, manggis, duku, rambutan, alpukat, sawo, dan beberapa jenis tanaman sayuran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan tanaman unggulan daerah melalui manajemen hulu-hilir, yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran atau manajemen tanam, petik, serta olah dan jual. Walaupun pembangunan perkebunan pala sebagai lahan percontohan di Distrik Kramongmongga, akan tetapi produksi pala tertinggi justru bukan di Kramongmongga. Produksi pala terbesar dijumpai di Distrik Teluk Patipi. Posisi kedua penghasil tertinggi pala ditempati oleh Distrik Fakfak Barat, baru kemudian disusul oleh Distrik Kramongmongga. Fakta ini tentu harus ditanggapi dengan positif yang membuktikan bahwa secara keseluruhan, Kabupaten Fakfak memiliki

potensi perkebunan yang sangat potensial bila dapat dikelola secara baik.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi

Sebenarnya program pertanian dan perkebunan tersebut merupakan program unggulan yang memiliki potensi sangat besar untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Fakfak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Fakfak. Namun program ini masih menghadapi permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks. Masalah pertama adalah keterbatasan teknologi pertanian. Permasalahan yang paling mencolok, misalnya, adalah benih yang ditanam oleh petani tanpa melewati uji varietas. Masalah yang kedua adalah penanganan pascapanen yang masih kurang baik. Ini terlihat dalam beberapa hal, misalnya adalah sistem pemasaran yang belum tertata secara sistematis. Selain itu, teknologi pengolahan hasil pertanian masih relatif rendah, misalnya produksi pala selama ini baru diolah menjadi manisan pala dan sirup pala secara tradisional, meskipun saat ini Disperindag tengah mendampingi masyarakat untuk membuat diversifikasi hasil tanaman pala agar menjadi produk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi dan mengarah menjadi *home industry*. Masalah ketiga adalah terbatasnya data dan hasil riset pertanian. Data hasil riset

pertanian sangat penting untuk pengembangan sector pertanian di Kabupaten Fakfak. Masalah keempat adalah isu hak ulayat. Program agribisnis dan hortikultura memerlukan investasi besar. Namun demikian investasi selama ini terhambat karena isu hak ulayat yang tidak memungkinkan investor mengelola sumber daya alam di tanah yang menjadi hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Fakfak.

2. Kehutanan dan Perkebunan

Pemerintah Kabupaten Fakfak memiliki potensi sumber daya hasil hutan yang cukup baik. Hasil hutan yang selama ini telah banyak dimanfaatkan berupa kayu dan hasil hutan nonkayu. Hasil hutan berupa kayu dikelola perusahaan melalui HPH. Di Kabupaten Fakfak saat terdapat 3 perusahaan di bidang kehutanan yang memiliki HPH, yakni: PT. Hanurata A, PT. Hanurata B, dan PT. Arfak Indah. Kayu hasil hutan dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni kayu merbau dan kayu meranti. Golongan kayu merbau (sejenis ulin, disebut sebagai ‘kayu besi’ oleh orang Fakfak) termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Fakfak. Karena dianggap produk unggulan, jenis kayu ini ditetapkan harganya secara tersendiri dalam PSDH melalui permendagri. Golongan kayu meranti, seperti kayu

sorea, matoa, dan merbau, merupakan kayu berkualitas tinggi sehingga hanya kayu dari golongan ini yang dieksplotasi oleh perusahaan HPH.

Adapun hasil hutan jenis non-kayu atau biasa juga disebut dengan istilah hasil hutan bukan kayu yang dihasilkan dari hutan di Kabupaten Fakfak adalah kulit masohi. Di bidang perusahaan kulit masohi ini, terdapat empat badan usaha yang memperoleh izin usaha untuk eksploitasi kulit masohi ini. Dalam hal eksploitasi kulit masohi, terdapat ketentuan bahwa setiap perusahaan hanya diperbolehkan mengeksploitasi kulit masohi maksimal 20 ton per tahun. Meski belum ada yang mencapai batas produksi maksimal tersebut, produksi perusahaan selama ini telah cukup baik. Secara bervariasi, perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan antara 3.000 kg hingga 5.000 kg per bulannya (Kab. Fakfak dalam Angka, 2012). Di Kabupaten Fakfak, baru terdapat sebuah industri pengelolaan kulit masohi.

Secara keseluruhan luas area hutan di Kabupaten Fakfak masih memungkinkan untuk dimanfaatkan kayunya. Hutan produksi tetap yang hasil hutannya dapat dimanfaatkan menempati jumlah luas paling besar, disusul hutan produksi terbatas. Posisi selanjutnya

adalah hutan dengan produksi yang dikonservasikan, PPA, lainnya, dan yang paling sempit adalah hutan lindung. Area hutan di kawasan Kabupaten Fakfak tidak tersebar di semua distrik secara merata, area hutan terluas dijumpai di Distrik Karas dengan luas secara keseluruhan 326.6669,71 Ha (Kab. Fakfak dalam Angka, 2012). Area ini dua kali lipat lebih luas daripada area hutan di Distrik Bomberay yang menempati urutan kedua. Urutan ketiga dijumpai di Distrik Fakfak Timur yang memiliki luas hampir sama dengan distrik di Bomberay.

Dari seluruh komoditas yang ditanam masyarakat, yaitu kopi, jambu mete, pala, cengkih, kakao, dan kelapa, komoditas pala yang menempati presentase tertinggi, jauh melebihi komoditas yang lain. Komoditas yang lain secara berturut-turut adalah kelapa, cengkih, jambu mete, kakao, dan yang terakhir adalah kopi. Besarnya persentase luas area yang ditanami pala hampir lima kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kelapa dan sekitar sembilan kali lipat dibandingkan dengan cengkih. Jumlah produksi pala berada paling tinggi disusul produksi hasil kelapa, kakao, kopi, cengkih, dan jambu mete.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi

Permasalahan mendasar yang dihadapi sangat terkait dengan hak ulayat. Hak ulayat atas tanah adat sering menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan investor. Konflik antara perusahaan dan masyarakat adat di Fakfak juga sangat sering terjadi. Bentuk konflik berupa aksi pemalangan (larangan memasuki/ menggunakan tanah/ hutan) oleh warga masyarakat adat terhadap areal hutan yang menjadi milik perusahaan. Jika masyarakat (adat) telah melakukan pemalangan, maka seluruh aktivitas di dalam kawasan yang dipalang tersebut harus dihentikan sampai tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu mencari cara penyelesaian secara terlembaga yang mampu menemukan titik temu yang saling menguntungkan antara masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Fakfak, dan investor.

Intervensi Kebijakan Masa Depan

1. Ketersediaan Tenaga Kerja

Perekonomian Masyarakat Lokal

Pengembangan potensi unggulan berbasis agribisnis tersebut memiliki sejumlah hambatan terutama dari sisi masyarakat lokal seperti keahlian, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan, pola hidup, adat (terutama tanah ulayat). Dilihat dari data pencari kerja di

Tabel 2. Intervensi Kebijakan terhadap Kondisi Ketenagakerjaan

Titik Kritis	Level Sasaran	Contoh Intervensi
Jumlah pencari kerja 37,64%	Individu dan Kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi • Pengembangan wirausaha lokal
Ketidakmerataan distribusi penduduk, misalnya: Distrik Fakfak (kota) 43,51 orang/km ² sedangkan Distrik Karas 1 orang/Km ²	Rumah tangga dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi lokal dari wilayah padat.
Jumlah penduduk (kepadatan penduduk 4,67/km ²)	Wilayah Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Transmigrasi dari Provinsi lain
Pendidikan (lama dan putus sekolah) dan kemampuan yang rendah di tiap distrik	Individu dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembebasan biaya sekolah hingga SMA • Mendekatkan fasilitas pendidikan • Transportasi yang mudah dan murah • Distribusi guru secara proporsional
Pola pikir (kemalasan, keborosan, kebiasaan buruk) ¹	Individu, rumah tangga dan komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengembangan produk pertanian, peternakan dan perikanan jangka panjang • Pemberian stimulan dengan pengawasan ketat • Pendampingan dengan menggunakan orang dalam (insitu)

Kabupaten Fakfak, menunjukkan lulusan sekolah menengah atas umum maupun kejuruan memiliki angka yang tinggi dalam mencari pekerjaan sebesar 37,64% (Profil Daerah Kabupaten Fakfak, 2013). Kekurangan jumlah tenaga kerja ini bila diamati dipengaruhi oleh komposisi penduduk Kabupaten Fakfak tergolong kelompok penduduk muda (Kab. Fakfak dalam Angka, 2012). Persebaran penduduk di Kabupaten Fakfak belum merata. Jika dilihat tingkat kepadatan penduduk kabupaten adalah 4,67 jiwa per km² yang sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi di daerah perkotaan, yaitu Fakfak Kota dengan kepadatan 40,46 per

km². Intervensi kebijakan terhadap ketenagakerjaan dijelaskan dalam Tabel 2.

Dari berbagai intervensi dalam Tabel 2 tersebut, transmigrasi dan pengembangan kapasitas lokal menjadi intervensi yang harus hati-hati dilakukan. Program transmigrasi di Papua menjadi isu yang cukup sensitif, sedangkan pengembangan kapasitas menjadi program yang sulit dilakukan karena membutuhkan waktu cukup lama dalam upaya merubah pola pikir masyarakat.

2. Peningkatan Perdagangan Lokal

Lima sektor yang menjadi titik kritis yang mempengaruhi perdagangan dalam mendukung pengembangan sektor agribisnis di Kabupaten Fakfaj, maka dapat masalah dan strateginya dapat dipetakan dalam Tabel 3.

3. Peningkatan Jaringan Kelembagaan (*Public—Private—Civil Society Partnership*)

Pengembangan sektor agribisnis memerlukan kerjasama antara: administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang

Tabel 3 Pemetaan Akses Perdagangan di Kabupaten Fakfak

Sektor	Titik Kritis	Intervensi
1. Investasi	Minimnya investasi pertanian dan pertambangan, khususnya untuk “Mega Proyek” Agropolitan	<ul style="list-style-type: none"> •Pemda Fakfak melakukan promosi ke Pemerintah Pusat (K/L), Provinsi lain, dan Perusahaan Swasta •Pengembangan potensi unggulan dengan disiplin waktu (1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, hingga 25 tahun)
	Masih banyaknya konflik pertanahan yang menyangkut hak ulayat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Perda Tata Guna Lahan • Pembuatan peraturan perjanjian jual beli tanah • Penguatan kelembagaan adat
2. Perdagangan	Kurangnya akses perdagangan di setiap distrik sehingga hampir seluruh masyarakat menjual hasil produksi ke <i>tengkulak</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Pasar di titik strategis
3. Perbankan	Kurangnya akses perbankan oleh masyarakat di Distrik lain selain Distrik Fakfak	<ul style="list-style-type: none"> •Kerjasama Pemda dan Bank menyediakan Bank Unit Desa •Sosialisasi jangka panjang mengenai perbankan
4. Koperasi	Minimnya jumlah koperasi di distrik (kecuali di kota)	<ul style="list-style-type: none"> •Pelatihan koperasi individu potensial yang diambil dari masyarakat setempat •Pendampingan jangka panjang pada masyarakat lokal untuk merubah pola pikir
	Koperasi tidak fokus bergerak pada sektor tertentu	Pembuatan KUD (Koperasi Unit Desa) pada sektor-sektor unggulan di masing-masing distrik, misalnya: KUD PALA,
5. Transportasi	Minimnya transportasi pengangkut hasil pertanian dan perikanan	Penyediaan transportasi regular antar distrik dan distrik ke kota, terutama laut dan udara
	Belum memadainya transportasi antar pulau	Pengembangan Bandar udara dan pelabuhan

beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992). Pemberdayaan kelembagaan menuntut perubahan operasional tiga pilar kelembagaan (Elizabeth, 2007a), yaitu:

- a. Kelembagaan lokal tradisional yang hidup dan eksisi dalam komunitas (*voluntary sector*).
- b. Kelembagaan pasar (*private sector*) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka.
- c. Kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (*public sector*).

Masyarakat adat Kabupaten Fakfak pada dasarnya berperan sebagai sentral pengelolaan seluruh sumber daya alam. Masing-masing suku asli memiliki tanah hak ulayat yang menjadi hak kelola masyarakat lahan pertanian, perkebunan dan hutan biasanya dimanfaatkan dalam berbagai macam tanaman sesuai dengan potensi di suatu wilayah. Pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat, lokal hingga saat ini memiliki produktivitas yang sangat minim. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat menyebabkan pengelolaan lahan yang tidak maksimal. Masyarakat masih menggunakan sistem

tradisional yang membiarkan tanaman tumbuh dengan sendirinya tanpa harus merawatnya. Pada tanaman pala yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Fakfak misalnya, masyarakat seakan sudah puas produktifitas kebun pala yang tumbuh secara liar. Keterlibatan masyarakat juga masih sangat minim pada kegiatan perbankan dan Koperasi. Hal ini terjadi karena masyarakat belum memiliki kebiasaan menyimpan uang dalam suatu lembaga keuangan. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan pola pikir bahwa hasil yang di dapat harus dihabiskan seketika itu juga. Apabila terpaksa harus menyimpan uang, masyarakat lebih memilih menyimpannya sendiri atau dititipkan pada kerabat. Pola konsumtif yang tinggi juga menjadi penghambat berkembangnya koperasi di Kabupaten Fakfak. Program bantuan yang telah digulirkan juga menemui kegagalan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembalikan dana pinjaman yang telah digulirkan.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan perkonomian rakyat. Peran tersebut dapat terwujud dengan pembuatan kebijakan atau program strategis yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), bantuan sosial, program peningkatan kapasitas (pendidikan dan keterampilan) dan

pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat. Program pembangunan ekonomi rakyat yang telah dilakukan diantaranya Agropolitan Bomberay, Agrowisata Kramongmongga, Reklamasi Thumburuni dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga berusaha memperkuat kelembagaan masyarakat lokal yang ada di distrik dan kampung. Pemerintah membuat program Kampung Mandiri merupakan salah satu strategi pendekatan pembangunan Kabupaten Fakfak yang akan diwujudkan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memberi peluang kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam disekitarnya.

Keterlibatan swasta dalam mendukung perekonomian rakyat secara umum dapat dikatakan masih sangat minim. Dengan minimnya jumlah investasi swasta tentu akan mempengaruhi nilai produksi dan jumlah tenaga kerja (masyarakat) yang terlibat. Selain itu, sektor swasta hanya dapat melibatkan tenaga kerja sebesar 833 orang (Bappeda Fakfak, 2012). Potensi sebenarnya terletak pada keberadaan home industri, walaupun tergolong industri kecil, namun dari 127 industri kecil dapat melibatkan 361 orang tenaga

kerja (BPS Fakfak, 2012). Keberadaan potensi pertambangan seharusnya menjadi peluang keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif. Potensi lain yang dapat ditingkatkan adalah mendorong bank-bank yang beroperasi di Kabupaten Fakfak untuk “menjemput bola” ke Distrik yang memiliki kesulitan akses pendanaan.

SIMPULAN

Kabupaten FakFak memiliki potensi SDA yang sangat besar terutama perkebunan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, dan sector strategis lain yang sedang dikembangkan adalah Migas dan pertanian. Potensi SDA yang sangat besar ini seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fakta menunjukkan bahwa potensi SDA ini belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah ini masih jauh di atas rata-rata nasional. Pengembangan strategi ekonomi kerakyatan yang harus diperhatikan adalah: Pertama, mengidentifikasi potensi ekonomi rakyat yang tepat dengan ciri *backward* dan *forward linkage* yang kuat; Kedua adalah menyediakan jenis tenaga kerja dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian yang akan dikembangkan;

Ketiga adalah membangun dan mengakses pasar (marketing); Keempat adalah mengembangkan lembaga perekonomian kerakyatan (semacam UKM); Kelima adalah membangun infrastruktur; dan terakhir adalah membangun *good local business governance* melalui konsep *public, private and civil society partnership*.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian-Indonesian Partnership (AIP). 2013. *Promoting Rural Income through Support for Markets in Agriculture (PRISMA)*.
- Bakti. 2008. *Eastern Indonesia area briefing*.
<http://www.bakti.org/index.php?section=163>
- Daidullah, Samsudin T. 2006. *Strategi Pengembangan Agropolitan Dinas Tanaman Pangan Hortikula, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Boul*. Yogyakarta. Thesis: Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Gajahmada.2006.
- Djakapermana, R D. 2007. *Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Yang Berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta. Direktorat Jendral Penataan Ruang
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah R.I.
- Edralin, J.S. 1997. *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach*. Regional Development Studies, Vol. 3.
- Fanggidae, I. G., Fajri, H., & Yuanjaya, Pandhu. (2016). Menelisik Kinerja Governance di Daerah Otonomi Khusus Papua Barat. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 91–106. <https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12618>
- Imbiri, S. (2010). *Dampak proyek perkebunan inti rakyat kelapa sawit terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat suku asli Papua di Kabupaten Manokwari (Studi kasus pada petani peserta plasma asal Suku Arfak di PTPN II Prafi)*. Malang: Brawijaya University
- Joku, Franzalber. 2007. *Problem and Propectus of the Special Autonomy Law*. University of Sydney.
- King, Peter. 2014. *West Papua and Indonesia Since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos?*. UNSW Press
- Mampioer. D. A. 2008. *Dari kolonisasi sampai transmigrasi di tanah Papua*.
<http://tabloidjubi.wordpress.com/2008/03/29/darikolonisasi-sampai-transmigrasi-di-tanah-papua/>

Uphoff, N., 1992. *Local Institution and Participation for Sustainable Development*. London: IIED

Wambrau, L. T. 2013. *Indigenous Entrepreneurship by Papuan Women In The Informal Agricultural Sector in Manokwari-West Papua Province in Indonesia*. Lincoln University